

# INTEGRASI PEMILIH BERINTEGRITAS NEGARA KUAT PADA LINGKUP MASYARAKAT LUBUK TILAN DAYUN KABUPATEN SIAK

Aleksander Yandra\*<sup>1</sup>, Andrizal Andrizal<sup>2</sup>, Adrian Faridhi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Administrasi Negara, Universitas Lancang Kuning  
e-mail: alexsy@unilak.ac.id

## Abstract

*Direct General Election by the public is a transfer of power and power competition, and a means of democracy in the embodiment of people's sovereignty in order to produce leaders as mandated in the Law. However, elections tend to be interpreted as a five-year procedural democracy that does not have a positive impact on people's lives. On the basis of these considerations, political education and civic culture in the community can encourage the political culture of participants and the culture of a democratic society, which is why these community service activities are made. This activity will be focused on Kampong Lubuk Tilan, Dayun District, Siak, where people are still not politically literate. Lubuk Tilan area is an urban, remote area where transactional political resistance and money politics often occur. For this reason, service is carried out in the form of political education and guidance by providing materials that can encourage and enrich people's knowledge related to ethical political values. This education and guidance will be in the form of lectures, discussions and supervisory technical guidance (checks and balances). This political and civic culture education will be provided by teaching staff who are experts in the fields of politics, law, citizenship and elements of regional election organizers, namely the KPU, especially the socialization division.*

**Keywords** – Election, Participations

## Abstrak

*Pemilihan Umum secara langsung oleh masyarakat merupakan sebuah transfer of power and power competition, dan sarana demokrasi dalam perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemimpin sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang. Akan tetapi pemilu cenderung dimaknai sebagai demokrasi prosedural lima tahunan yang tidak berdampak positif terhadap kehidupan masyarakat. Atas dasar pertimbangan tersebut maka pendidikan politik dan civic culture di lingkungan masyarakat dapat mendorong budaya politik partisipan dan budaya masyarakat demokratis, oleh karena itulah kegiatan pengabdian masyarakat ini di buat. Kegiatan ini akan difokuskan pada Kampong Lubuk Tilan Kecamatan Dayun Kabupaten Siak yang masyarakat masih belum melek terhadap politik. Daerah Lubuk Tilan merupakan daerah urban, pelosok yang resistensi politik transaksional dan money politik sering terjadi. Untuk itu pengabdian yang dilakukan dalam bentuk pendidikan politik dan bimbingan dengan memberikan materi-materi yang dapat mendorong dan memperkaya pengetahuan masyarakat terkait dengan tata nilai politik etik. Pendidikan dan bimbingan ini akan dilakukan dalam bentuk ceramah, diskusi dan bimbingan teknis pengawasan (check and balances). Pendidikan politik dan civic culture ini akan diberikan oleh staf pengajar yang ahli di bidang politik, ilmu hukum, kewarganegaraan serta unsur penyelenggara pemilu yaitu KPU khususnya divisi sosialisasi.*

**Kata kunci** - Pemilu, Partisipasi

## 1. PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan sebuah sistem politik yang berupaya untuk mengantarkan keputusan-keputusan politik secara partisipatif oleh individu-individu yang mendapatkan kekuasaan melalui persaingan yang adil (fairness competition) dalam memperebutkan suara rakyat (Agustino, 2005). Salah satu ciri negara demokrasi adalah adanya pemilihan umum yang dilaksanakan secara periodik, termasuk pemilihan umum nasional yang memilih anggota DPRD Kabupaten/ Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD RI dan Pemilihan Presiden ataupun pemilihan umum daerah yang memilih kepala daerah.

Transisi demokrasi yang stabil umumnya didahului dengan bangkitnya dinamika, kompetisi dan konflik di kalangan elit (Robert A. Dahl). Demokrasi sedang terjadi di Negara kita

Indonesia jelang Pemilu dan pilpres 2019 mencerminkan realitas seperti itu. Dinamika politik yang semakin dinamis terjadi saat ini bukan saja berfungsi menyalurkan perbedaan yang memang ada dalam masyarakat sebaliknya menjadi motor penggerak pertumbuhan sebuah bangsa jika perbedaan itu terkendali.

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan berfokus pada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Oleh karena itu demokrasi menuntut partisipasi aktif dari masyarakat, mulai dari yang berupa keikutsertaan langsung masyarakat dalam program pemerintahan maupun sifatnya tidak langsung, seperti sumbangan dana, tenaga, pikiran, maupun pendapat dalam pembuatan (perumusan) kebijakan pemerintah.

Dalam konteks Pemilihan Umum partisipasi politik adalah unsur dasar bagi terlaksananya suatu demokrasi. Semakin besar jumlah peserta pemilih maka demokrasi seringkali dinyatakan sukses karena menunjukkan kemauan dan kesadaran berpolitik rakyat. Akan tetapi benarkah kuantitas jumlah peserta pemilih simetris dengan keberhasilan proses demokrasi (Susan, 255:2010). Metode statistik ini tampaknya memerlukan pandangan berbeda yaitu dari sisi kualitas partisipasi politik. Oleh karena itu perlu adanya suatu upaya berkesinambungan dalam pemberdayaan politik masyarakat.

Mengukur kualitas partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum merupakan salah satu hal yang esensial dalam menentukan apakah kepemimpinan politik kedepan berkualitas, akuntabel dan kredibel. Maka, pemilu 2019 nantinya menjadi wadah yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menentukan siapa yang akan mewakili mereka dalam lembaga legislatif, dan siapa yang akan memimpin mereka dalam lembaga eksekutif (Presiden). Artinya pemilihan umum juga merupakan wadah untuk menjangkau orang-orang yang benar-benar bisa dan mampu untuk masuk ke dalam lingkaran elit politik, baik itu di tingkat daerah maupun di tingkat nasional.

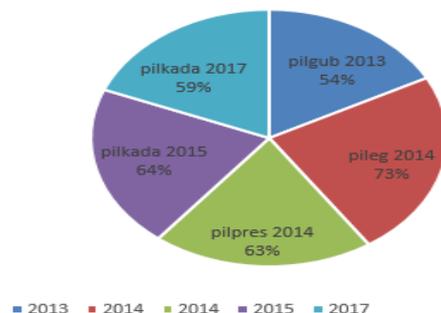
Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mempunyai integritas, profesional dan akuntabilitas yang tinggi serta diikuti oleh masyarakat yang cerdas politik ataupun entitas lainnya seperti perguruan tinggi sebagai civil society. Setidaknya peran perguruan tinggi dalam pemilu dapat terlihat dalam pemantauan pemilu, riset politik dan pemberdayaan/ pendidikan politik

Oleh karena itu pemerintah dan perguruan tinggi bisa bermitra untuk menjamin terselenggaranya Pemilihan Umum 2019 secara langsung, umum, bebas, rahasia, sehingga hak-hak politik masyarakat pada tingkat daerah dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya pemerintah, perguruan tinggi dan unsur yang terkait harus dapat menjaga emosional primordial masyarakatnya, memelihara ketentraman dan ketertiban umum selama dilaksanakannya proses Pemilu. Sebagaimana tagline Pemilu yang juga menjadi nilai filosofi dari pentingnya penguatan Pemilih yaitu "Pemilih Berintegritas Negara Kuat" perlu menjadi upaya bersama dari entitas demokrasi.

Fenomena yang menarik dari pelaksanaan Pemilihan Umum adalah keterlibatan masyarakat yang aktif dari berbagai entitas. Dimana setiap entitas masyarakat memiliki kesamaan hak dan kewajiban dalam politik, sehingga diharuskan untuk ikut serta secara sadar tanpa dipaksa dalam momentum pemilu tersebut. Dinamika yang berlangsung ini sejalan dengan harapan pemerintah ketika menerbitkan UU pemilu dan UU pemerintah daerah yaitu demokrasi harus dapat dilaksanakan dengan baik tingkat nasional maupun di aras lokal. Salah satu indikator terlaksananya demokrasi terlihat dari tingginya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu itu. Bahkan dengan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses Pemilu, pemerintah semakin percaya dengan semakin tumbuhnya budaya politik partisipan sebagai bagian dari penguatan budaya kewargaan (civic culture) yang menjadi dasar proses demokrasi mapan yang ingin dilaksanakan. Oleh karena itu perlu adanya upaya berkelanjutan dalam mendorong terciptanya demokrasi mapan baik ditingkat pusat maupun ditingkat local.

Pelaksanaan Pemilu Nasional Tahun 2019 yang dilaksanakan pada 17 April 2019 masih sarat akan berbagai masalah. Berbagai kecenderungan yang terjadi adalah Pemilu Presiden (Pilpres) lebih populer dibandingkan pemilu legislative bahkan masyarakat masih apatis dan pragmatis dalam menentukan pilihan politiknya khususnya di Kampung Lubuk Tilan, hal ini

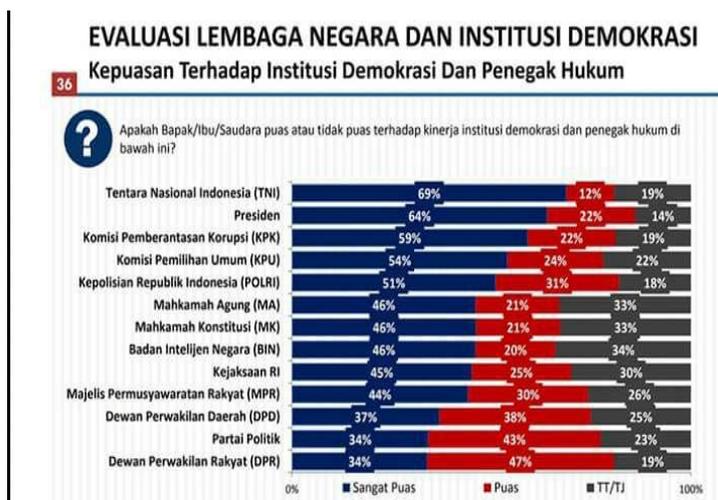
terlihat rendahnya partisipasi politik masyarakat pada pemilu rentang waktu 2013-2017 di Riau. Berikut angka partisipasi politik masyarakat Riau yang cenderung flat dan relatif tidak adanya peningkatan yang signifikan.



Permasalahan lainnya adanya pengelompokan entitas masyarakat seperti bagi milenial, tokoh masyarakat, pemula, Ibu-Ibu Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) secara oposisional seharusnya mampu menjadi medium dalam memberikan pengaruh terhadap pilihan politik yang lebih bijak terhadap pemilih di daerah. Selain itu, dinamika konstelasi politik dalam Pemilu secara tidak langsung telah membuka ruang partisipasi yang tinggi dari masyarakat secara kelompok. Hal ini jelas akan menimbulkan kelompok massa yang mengedepankan semangat entitasnya, sehingga secara tidak langsung terjadi polarisasi masyarakat yang hidup bersamaan dalam situasi sosial apapun.

Selanjutnya data survey Syaiful Mujani Research Conculatan (SMRC) menunjukkan angka rendahnya kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi dan penegak hukum. Hal inilah yang mengkhawatirkan bagi kami pelaksana pengabdian untuk memperkuat pemahaman berdemokrasi bagi masyarakat di daerah urban kota. Apalagi preferensi politik masyarakat masih memilih karena diimingi sesuatu apakah uang, sembako dsb. Untuk itu kami sebagai pelaksana pengabdian selalu mengingatkan akan semangat kebersamaan dalam mewujudkan Riau yang berkeadilan menuju Indonesia yang bermartabat.

Berikut data terkait survey SMRC yang memperlihatkan grafik tingkat kepercayaan (trust) masyarakat terhadap institusi demokrasi dan penegakkan hokum di Indonesia:



Gambar 1. Hasil Survey SMRC 2017

Berdasarkan data diatas perguruan tinggi dipandang perlu untuk melakukan pengabdian pada masyarakat sebagai bentuk penguatan tri darma perguruan tinggi. Dalam konteks politik dan kebangsaan perguruan tinggi dapat memainkan peran untuk mewujudkan “Integritas Pemilih dari yang pasif menjadi aktif” artinya mengkampanyekan dan mensosialisasikan pentingnya pemilih yang rasional untuk lahirnya pemimpin yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu bentuk kontribusinya dalam membentuk kesadaran berpolitik masyarakat di aras lokal dan membudayakan perilaku politik partisipan yang mengutamakan visi dan kredibilitas calon pemimpin yang di usung. Hal ini tidak mengartikan perguruan tinggi ikut politik praktis tetapi justru sebaliknya perguruan tinggi menciptakan politik etik yang ideologis di lingkungan masyarakat bawah (kampung).

Sebagai salah satu perguruan tinggi yang ada di Provinsi Riau, Universitas Lancang Kuning (UNILAK) menyadari akan pentingnya kontribusi perguruan tinggi dalam mewujudkan visi bangsa yaitu perilaku masyarakat yang cerdas dalam politik dan konsolidasi demokrasi segera terwujud baik di tingkat nasional maupun lokal. Dengan kondisi tersebut di atas, maka dipandang perlu kontribusi Perguruan Tinggi Unilak melakukan pendidikan politik yang inkulisif dan penguatan civic culture bagi masyarakat kampung Lubuk Tilan Kecamatan Dalu Kabupaten Siak untuk memenuhi hak dan kewajibannya dalam politik. Kampung ini merupakan daerah trans dan terletak pada daerah urban dimana intensitas arus informasi sangat tinggi namun masyarakat belum mampu mengontrolnya. Oleh karena itu kegiatan pengabdian ini dapat menciptakan kultur masyarakat yang sadar akan politik etik dan mendorong terwujudnya budaya kewargaan dari masyarakat. Terlihat dari berbagai intensitas keterlibatan masyarakat dalam tahapan pemilu bahkan yang menariknya terjadi peningkatan partisipasi politik masyarakat 78%.

**2. METODE**

Kegiatan pengabdian masyarakat ini akan dilakukan dengan metode *Focus Group Discussion* (FGD) dan bimbingan (pendampingan). Diskusi Kelompok Terarah atau *Focus Group Discussion* merupakan suatu proses pengumpulan informasi mengenai suatu masalah tertentu yang sangat spesifik (Irwanto, 2007). Henning dan Columbia (1990) menjelaskan bahwa diskusi kelompok terarah adalah wawancara dari sekelompok kecil orang yang dipimpin seorang narasumber atau moderator yang mendorong peserta untuk berbicara terbuka dan spontan tentang hal yang dianggap penting dan berkaitan dengan topik saat itu.

Menurut Andi Prastowo (2008) Diskusi Kelompok Terarah merupakan suatu bentuk penelitian kualitatif dimana sekelompok orang dimintai pendapatnya mengenai suatu produk, konsep, layanan, ide, iklan, kemasan / situasi kondisi tertentu. Tujuan dari Diskusi Kelompok Terarah itu sendiri adalah untuk memperoleh masukan atau informasi mengenai permasalahan yang bersifat lokal dan spesifik khususnya hak politik bagi penyandang disabilitas. Penyelesaian masalah ini ditentukan oleh pihak lain setelah informasi berhasil dikumpulkan dan dianalisis.

Menurut Andi Prastowo (2008), prinsip yang harus dipegang teguh dalam Diskusi Kelompok Terarah adalah:

1. FGD adalah Kelompok Diskusi, bukan wawancara atau obrolan. Ciri khas metode riset FGD yang tidak dimiliki oleh metode penelitian kualitatif lain (baik wawancara mendalam maupun observasi) adalah adanya interaksi.
2. FGD adalah Group, bukan individu. Sehingga, agar dinamika kelompok berjalan lancar, setiap anggota kelompok terlibat secara aktif.
3. FGD adalah diskusi terfokus, bukan diskusi bebas. Tidak hanya terfokus pada Interaksi dan Dinamika Kelompok, namun pula terfokus pada Tujuan Diskusi.

Metode ini dilakukan untuk menguak isu-isu dan hak politik dari masyarakat akar rumput, dengan memberikan materi terkait tentang pendidikan politik yang mengutamakan tata nilai etika, esensi pemilu dalam negara demokrasi dan beberapa contoh kasus yang terkait dengan permasalahan politik dan kebangsaan yang berimplikasi terhadap ketidakstabilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Membangun sebuah formulasi ide dengan diskusi yang dilakukan setelah pemateri selesai menyampaikan topiknya. Para peserta akan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan kembali merespon jawaban yang diberikan oleh pembicara. Hal ini dilakukan agar peserta benar-benar dapat memahami apa yang telah disampaikan dan menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selanjutnya metode bimbingan dilakukan dengan cara memberikan pendampingan terhadap masyarakat yang memberikan *check and balances* terhadap penyelenggaraan pemilu kada. Beberapa hal dilakukan dalam hal penguatan

Pengabdian kepada masyarakat tentang pendidikan politik inklusif dan *civic culture* bagi masyarakat Ibu PKK di Kelurahan Muara Fajar Barat Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru ini akan dilaksanakan oleh Tim Dosen Fakultas Ilmu Administrasi yang terdiri dari:

No	Nama	Kelayakan
1	Alexsander Yandra, S.IP, M.Si	Dosen pengampu mata kuliah sistem politik Indonesia dan teori ilmu administrasi negara, dimana perlunya memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk berpolitik secara etik agar demokrasi substansial dapat terwujud. Selanjutnya memberikan bimbingan terkait mekanisme politik yang sesuai dengan sistem politik yang ada di Negara Indonesia, sebagaimana penguatan infrastruktur politik dari kelompok masyarakat dalam fungsi <i>check and balances</i>
2	Andrizal, SH, MH	Dosen pengampu mata kuliah Hukum Administrasi, dimana pemerintah menjadi <i>starting point</i> dalam mewujudkan hak-hak publik termasuk hak bagi masyarakat urban/ kampung karena pemerintah dibentuk untuk mewujudkan hak publik pada intinya. Sehingga apapun yang berkaitan dengan publik pemerintah harus mampu mengalokasikan anggaran untuk keikutsertaannya mensukseskan pesta demokrasi.
3	Adrian Faridhi, SH, MH	Dosen pengampu mata kuliah Hukum Pemilu, dimana perlu adanya <i>government product</i> dalam menciptakan kondisi yang stabil menuju demokrasi yang mapan. Etika

Pemilu juga menjadi hal yang sangat penting untuk disampaikan agar terwujudnya pemilu yang damai dan berintegritas.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, dilakukan dalam bentuk pelatihan dengan metode ceramah, diskusi, dan bimbingan (konsultasi terarah dan berkelanjutan). Metode ceramah dilakukan dengan memberikan pemaparan materi terkait tentang pentingnya berpartisipasi dalam politik dan penguatan peran publik dalam demokrasi adapun tema yang disampaikan terkait dengan azas pemilu, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Daftar Caleg dan Partai Politik, metode kampanye dsb. Metode diskusi akan dilakukan setelah pemateri selesai menyampaikan topiknya, peserta merespon materi yang disampaikan jika masih belum dipahami. Para peserta akan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan kembali merespon jawaban yang diberikan oleh pembicara secara interaktif. Hal ini dilakukan agar peserta benar-benar dapat memahami secara komprehensif apa yang telah disampaikan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga target terwujudnya kualitas partisipasi masyarakat yang berdaya guna dapat tercapai di lingkungan masyarakat Kampung Lubuk Tilan dayun.

Sebagai basis awal penguatan dilakukan dengan memberikan pemahaman tentang tahapan pemilu 2019 yang akan berjalan, sebagaimana gambar berikut:



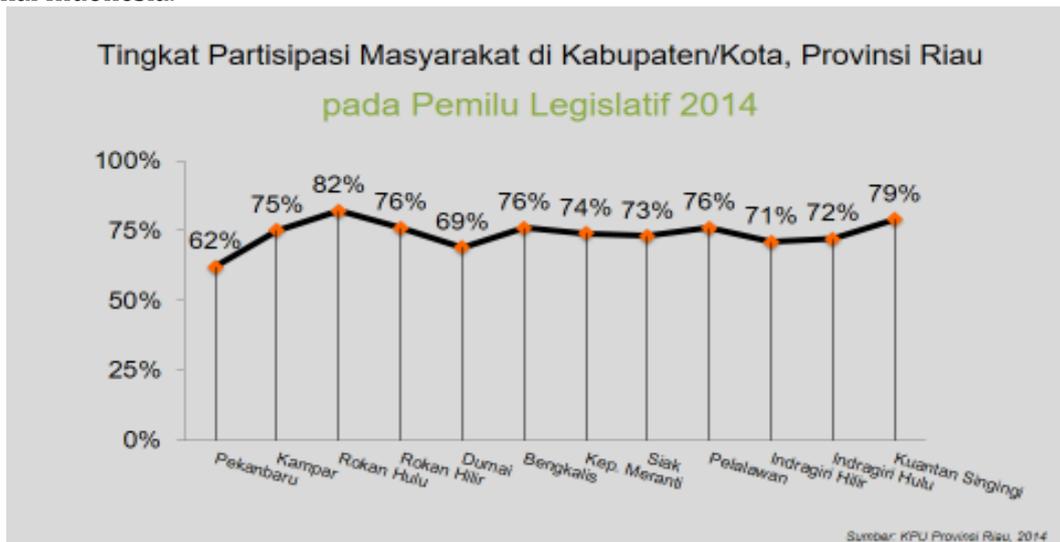
Tahapan pemilu di atas menjadi sangat penting dan esensi untuk disampaikan karena menurunnya angka partisipasi masyarakat dalam setiap helatan demokrasi di Riau disebabkan mayoritas masyarakat tidak memahami tahapan pemilu sebagaimana mestinya. Dalam kegiatan pengabdian ini pelaksana melakukan penyebaran undangan kepada masyarakat Lubuk Tilan, namun dari 50 undangan yang disebarkan kepada masyarakat Lubuk Tilan peserta yang hadir hanya 35 Orang namun yang mengisi kuisisioner pengabdian hanya 30 orang. Berikut data responden yang mengisi kuisisioner saat pengabdian dilaksanakan:

Jenis Kelamin	Jumlah	Pendidikan Terakhir			
		SD	SMP	SLTA	PT
Laki-Laki	20	2	6	10	2
Perempuan	10	2	1	4	3
<b>TOTAL</b>	<b>30</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>5</b>

Sumber: Kuisisioner Pengabdian Kampung Lubuk Tilan 2019

**Tabel 1.1** Data Responden Pengabdian

Responden didominasi oleh Laki-laki dengan mayoritas pendidikan SLTA sedangkan Perempuan hanya sepertiga dari peserta yang mengikuti kegiatan pengabdian ini, namun dapat kita informasikan bahwa masyarakat yang mengikuti kegiatan ini representasi dari PKK, Ibu RT, Ibu Elit Kampung Lubuk Tilan, sehingga dapat menstimulus mereka para pemilih untuk mau meningkatkan partisipasi masyarakat secara aktif dan menjadi bagian pengawal demokrasi. Karena penurunan tingkat partisipasi masyarakat dalam beberapa helatan demokrasi di Riau mendeskripsikan bahwa masyarakat mulai tidak percaya dengan pemerintahnya jika ini berlangsung terus menerus maka ketidakstabilan politik akan terjadi dan mengancam ketahanan nasional Indonesia.



Berikut foto kegiatan pengabdian tentang Integrasi Pemilih Berintegritas Negara Kuat terkait esensi partisipasi dalam politik dan cara mengidentifikasi pemilih yang cerdas agar dapat mewujudkan pemimin yang berkualitas di Kampung Lubuk Tilan yang menggambarkan bagusnya respon para pemerintah dan masyarakat kampung.



**Gambar 2.** Tim Pengabdian dengan Pemerintah Kampung Lubuk Tilan

Tentunya kegiatan pengabdian ini dilakukan agar peserta benar-benar dapat memahami apa yang telah disampaikan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan terwujudnya kualitas calon legislator yang benar mampu mewakili aspirasi masyarakat dan meningkatkan daya saing bangsa. Output yang ingin dicapai dalam pengabdian ini adalah terciptanya ketahanan masyarakat daerah dalam politik yang etik serta penguatan ideology politik. Artinya bagaimana dalam jangka waktu yang panjang semangat lokal mampu merekat praktik demokrasi nasional.

Respon positif dari peserta yang ditunjukkan dengan keseriusan dalam mengikuti rangkaian kegiatan, selanjutnya layanan yang diberikan oleh pelaksana pengabdian dapat dilihat

telah ada beberapa masyarakat yang berkonsultasi ke *call center* kami. Semoga dengan adanya bimbingan ini dapat meningkatkan kualitas demokrasi masyarakat Kampung Lubuk tilan. Sebagai pelaksana pengabdian kita sangat merasakan kebutuhan masyarakat akan kepastian politik semakin membaik. Bahkan kami melanjutkannya dengan berbagai kegiatan pra pengabdian lainnya seperti pembinaan masyarakat melalui konsep pemberdayaan, karena Kampung Lubuk Tilan suatu daerah yang baru dimekarkan dan berada pada daerah urban.

Berikut foto kegiatan pelaksanaan pengabdian di kelurahan Muara Fajar Barat.



**Gambar 3.** Foto saat penyampaian materi

Penyampain materi dilakukan dengan metode PRA sehingga para peserta cenderung dijadikan sebagai subjek dan bukan objek dari pengabdian. Hal ini agar pasca kegiatan pengabdian para peserta memiliki tanggung jawab untuk dapat memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat lainnya yang akan memilih pada Pemilu 2019.

### **Pemetaan Pengetahuan Masyarakat**

Pemilihan Umum atau yang kita kenal dengan sebutan Pemilu adalah bentuk pelaksanaan demokrasi prosedural. Konsep bernegara itu adalah ada penyerahan sebagian kewenangan dan keinginan kita yang diserahkan sebagian kecil orang untuk menentukan kehidupan secara bersama. Maka dari itu pelaksanaan penyerahan kewenangan bersiat periodik dan lima tahunan. Selanjutnya segala tuntutan dan dukungan kita dikendalikan oleh "Presiden (Kepala Negara)" untuk menentukan kehidupan sehari-hari melalui kebijakan yang di ambilnya. Presiden itu yang akan jadi pemimpin kita dalam konteks negara, oleh karenanya perlu kita mengetahui calon presiden semenjak dini atau dari proses awalnya.

Untuk itu perlu mengetahui pengetahuan peserta, maka pelaksana pengabdian melakukan uji kuisisioner dengan 30 peserta sesudah pelaksanaan kegiatan.

Sumber: Data olahan kuisioner 2019

Dari hasil tabulasi kuisioner di atas, dapat dipetakan bahwasanya respon masyarakat mayoritas baik dengan deskripsi pengetahuan masyarakat sebelum kegiatan pengabdian masih relatif minim dalam hal tahapan, calon legislative dan calon presiden. Mayoritas masyarakat menilai kegiatan pengabdian dengan materi yang disampaikan baik dengan jawaban 124 sedangkan yang menyatakan kurang sekali adalah 0. Berikut kesimpulan skala penilaian dari tabulasi kuisioner tentang respon peserta:

No	Nilai	Jumlah
1	Baik Sekali	74
2	Baik	124
3	Cukup	67
4	Kurang	11
5	Kurang Sekali	0

Partisipasi politik masyarakat dalam pemilu terlihat dari data yang sampai 87%, maka setelah kegiatan dilaksanakan pengetahuan masyarakat meningkat signifikan bahkan mulai mengetahui nama-nama calon wakil rakyat yang akan berkompetisi. Oleh karena itu, perlu menjaga komitmen peserta untuk tetap menggunakan hak suara dalam Pemilu 2019 nantinya. Maka kita pelaksana pengabdian mencoba mengedukasi peserta dengan memperlihatkan berbagai dampaknya, serta melakukan layanan berbasis *call center*. Layanan ini bersifat berkelanjutan (simultan), dimana layanan ini langsung dikelola oleh tim.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan pengabdian yang dilakukan dan dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat Kampung Lubuk Tilan Kecamatan Dayun Kabupaten Siak tentang politik khususnya terkait partisipasi yang sebelumnya sangat minim pasca kegiatan meningkat terlihat dari angka partisipasi politik masyarakat 87%. Untuk selanjutnya, masyarakat akan lebih berhati-hati dalam

No	URAIAN	Skala Penilaian				
		5	4	3	2	1
1	Materi yang disampaikan dalam Pengabdian Masyarakat	10	17	1		
2	Respon masyarakat terhadap materi yang disampaikan	6	17	5		
3	Hubungan materi yang disajikan dengan kebutuhan Masyarakat	9	9	9		
4	Keterkaitan antara materi dengan aplikasi yang dapat diserap di masyarakat	6	11	8	2	
5	Keterkaitan materi dengan kebutuhan	8	13	5	1	
6	Pemateri dan Teknik Penyajian	8	12	6	2	
7	Waktu yang dipergunakan dalam pemberian materi	7	11	9	1	
8	Kejelasan materi	8	12	7	1	
9	Minat masyarakat terhadap kegiatan	6	10	8	3	
10	Kepuasan kegiatan	6	12	9	1	
Total		74	124	67	11	0

memilih pemimpin karena menyangkut kehidupan atau kesejahteraan lima tahun kedepan.

Selama ini pendidikan politik yang dilakukan partai politik belum efektif karena partai hadir sewaktu pemilu saja.

Berdasarkan kesimpulan di atas, adapun saran yang ingin disampaikan diantaranya sebagai berikut Sosialisasi pendidikan politik yang berintegritas perlu ditingkatkan melalui pendekatan pelatihan dan bimbingan dengan melibatkan kolaborasi berbagai unsur pemerintah, perguruan tinggi dan masyarakat secara sustainable. Masyarakat harus selalu terbuka terhadap permasalahan yang dihadapi khususnya masalah politik dan budaya kewargaan sebagai bentuk penguatan dan investasi demokrasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Gede Purnama Putra. 2009. Meretes Perdamaian dalam Konflik Pilkada Langsung. Jakarta: Gava Media.
- Abdilah S Ubed. 2002. Politik Identitas Etnis: Pergulatan Tanda Tanpa Identitas. Magelang: Indonesiatara.
- Agustino, Leo, Pilkada Langsung: Beberapa Catatan Kritis Dalam Jurnal Analisis CSIS Vol. 43 no 2 Juni 2005, Jakarta, 2005.
- Bahar, Safaruddin, dkk. (Ed). 1996. Integrasi Nasional, Teori, Masalah, dan Strategi. Jakarta: Gramedia.
- Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT. Pustaka Gramedia.
- Cliford, Geertz. 2009. The Interpretation Of Culture. Dalam sebuah jurnal penelitian politik Vol.6, No.1, 2009 Kisruh Pemilu. Jakarta. LIPI Press.
- Isaac, Harold R. 1993. Pemujaan Terhadap Kelompok Etnis, Identitas Kelompok Dan Perubahan Politik. Terjemahan Canisyus Maran. Jakarta: YOI.
- Marijan, Kacung. 2010. Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru. Jakarta: Kencana.
- Prihatmoko J, Joko. 2005. Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, Sistem dan Problem Penerapan di Indonesia. LP3M. Universitas Wahid Hasyim.
- Rihadmaji, Dodi. 2003. Merintis Pemikiran Pemilu Kada Secara Langsung, dalam Abdul Gaffar Karim (ed) Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sarundajang. 2005. Pemilu Kada Langsung Problem dan Prospek. Kata Hasta Pustaka. Jakarta.
- Setyanto, P Widya. 2009. Politik Identitas: Agama, Etnisitas, Dan Ruang/Space Dalam Dinamika Politik Di Indonesia. Peresmian Cinta Kemanusiaan (Percik): Yogyakarta.
- Susan, Novri M.A. 2010. Pengantar Sosiologi konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Thimothy D. Sisk. 2001. Democracy at The Local Level The Internatinal IDEA Handbook on Participation, Representation, Conflict Management, and Governance, Sweden: International IDEA.
- Tirtosudarno, Riwanto. 2007. Mencari Indonesia (Demografi-Politik Pasca Soeharto). Jakarta: LIPI Press.
- Waisale, Yamin. 2010. Dengung Pemilu Kada 2010: Merasa Benar di Jalan Yang sesat. Jakarta: PT. Semarak Tata Warna.
- Widjojo, Muridan S. 2007. Nasionalisme dan Etnisitas, dalam Firman Noer, (Ed). Nasionalisme, Demokratisasi dan Identitas Primordialisme. Jakarta: Pusat Politik LIPI.
- Yandra, A. (2017). Fisibilitas Pilkada Serentak Tahap II Kota Pekanbaru Pasca Permendagri No 18 Tahun 2015. *Jurnal Niara*, 9(2), 62-74.
- Yandra, A. (2017). Penyelamatan Hak Pilih Warga Perbatasan Jelang Pilkada. *POLITIK*, 13(1).